

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. DASAR PEMIKIRAN**

Gerakan perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender merupakan salah satu gerakan progresif dalam sejarah Indonesia. Kemunculan gerakan ini tidak terlepas dari pengaruh feminisme internasional serta dampak Politik Etis pada masa Hindia Belanda yang membuka akses pendidikan bagi perempuan. Sejak awal, perjuangan perempuan berfokus pada pemenuhan hak pendidikan, partisipasi sosial, serta keterlibatan dalam ranah politik dan ekonomi. Namun, dalam perkembangannya, gerakan ini menghadapi tantangan besar berupa konstruksi sosial patriarkal dan kebijakan negara yang belum sepenuhnya mendukung kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki di ruang publik (Francisia, 2015).

Pada masa pra-kemerdekaan hingga awal kemerdekaan, organisasi perempuan di Indonesia berkembang pesat dan memainkan peran penting dalam perjuangan nasionalisme dan politik, yang ditandai dengan penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia I tahun 1928. Namun, dinamika tersebut mengalami perubahan signifikan pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965. Pemerintah Orde Baru memanfaatkan peristiwa ini untuk menekan dan membatasi gerakan perempuan dengan dalih stabilitas nasional, sehingga partisipasi politik perempuan diarahkan ke bentuk yang bersifat pasif dan terkendali (Raharjo, 2014).

Pada masa Orde Baru, negara mengonsolidasikan organisasi perempuan melalui Kowani serta membentuk organisasi seperti PKK dan Dharma Wanita. Meskipun Kowani telah berdiri sejak 1928 sebagai federasi organisasi perempuan, pada masa Orde Baru organisasi ini dipengaruhi oleh negara, yang tampak dari dominasi unsur Golkar dalam struktur kepengurusannya (Achidsti, 2021). Sementara itu, PKK dan Dharma Wanita berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara dalam mengatur peran perempuan dengan menekankan fungsi domestik sebagai istri dan ibu. Struktur organisasi yang mengikuti jabatan suami memperlihatkan kecenderungan feodalistik, di mana penghormatan terhadap

perempuan didasarkan pada status suami, bukan kapasitas individual perempuan itu sendiri (Achidsti, 2021).

Meskipun pemerintah Orde Baru secara formal menyatakan komitmen terhadap pemberdayaan perempuan—melalui GBHN, Repelita, serta ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984—kebijakan yang dijalankan justru menunjukkan pelanggaran domestifikasi perempuan (Farida, 2011). Perempuan didorong untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tetapi tetap dibebani kewajiban domestik yang dilegitimasi sebagai kodrat. Kondisi ini melahirkan peran ganda perempuan serta membatasi ruang gerak mereka di ranah publik (Fitalaya, 1997).

Julia Suryakusuma menyebut konstruksi ideologis tersebut sebagai ibuisme negara, yaitu ideologi gender yang menempatkan perempuan terutama sebagai ibu dan istri demi menjaga stabilitas keluarga, masyarakat, dan negara (Suryakusuma, 2011). Ibuisme negara merupakan gabungan dari konsep *housewifization* (Mies, 1986), *priyayisme* (Djajadiningrat, 1987), dan cara negara memproduksi makna gender secara hierarkis (Fathimah, 2021). Melalui kebijakan, organisasi perempuan, media, dan pendidikan, negara mereproduksi citra perempuan ideal yang subordinat dan membatasi perempuan sebagai subjek politik yang otonom (Setiyawan & Wahyuni, 2023).

Dalam kondisi politik yang otoriter tersebut, gerakan perempuan pada masa Orde Baru menyesuaikan strategi perjuangannya dengan memilih jalur yang lebih aman, seperti advokasi berbasis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Beberapa LSM perempuan, seperti Rifka Annisa dan Kalyanamitra, memfokuskan perjuangan pada advokasi dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan (Printina, 2019). Menjelang akhir Orde Baru, terutama pada masa krisis ekonomi 1997–1998, gerakan perempuan kembali menunjukkan dinamika resistensi yang lebih terbuka.

Salah satu bentuk perlawanan penting adalah berdirinya Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) pada tahun 1995 oleh Gadis Arivia bersama sejumlah akademisi

dan aktivis perempuan (Perempuan, 1995). YJP menjadi ruang penyebaran wacana feminisme kritis melalui penerbitan *Jurnal Perempuan* serta keterlibatannya dalam gerakan Suara Ibu Peduli. Dalam gerakan ini, identitas “ibu” digunakan sebagai strategi politik untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan Orde Baru, khususnya pada masa krisis ekonomi. Strategi ini menunjukkan bagaimana konstruksi keibuan yang sebelumnya digunakan negara sebagai alat kontrol justru dimanfaatkan kembali oleh perempuan sebagai sarana resistensi politik (Arivia, 2007).

Dapat dikatakan bahwa Suara Ibu Peduli ini adalah bentuk kecerdasan strategi politik perempuan yang dapat memanfaatkan kembali konstruksi sosial yang dilanggengkan pada masa Orde Baru. Konstruksi sosial yang berdampak dalam meminggirkan peran perempuan dalam kehidupan politik Indonesia, menjadi salah satu bukti senjata makan tuan bagi akhir masa pemerintahan tersebut. Dalam hal ini, Yayasan Jurnal Perempuan dalam gerakan SIP menggunakan strategi politik identitas untuk menyuarakan kritik kepada pemerintah. Dimana menggunakan simbolik yakni identitas sebagai “ibu”, yang berbasis dengan nilai-nilai sosial budaya yang akrab di tengah masyarakat. Sehingga gerakan ini turut serta membangun legitimasi moral serta politik dalam gerakan aktivis perempuan pada akhir Orde Baru.

Gerakan SIP terlihat sebagai bentuk subversif yang kreatif terhadap kekuasaan Orde Baru dengan wajah maskulin dan otoriternya. Meski di sisi lain, strategi ini dikritik oleh beberapa akademisi serta aktivis karna berpotensi menguatkan kembali norma gender tradisional, dimana menempatkan perempuan dalam ranah domestik. Hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam bagaimana pada identitas “ibu” menjadi alat politik yang efektif dalam mengkonfrontasi pemerintah Orde Baru, seperti yang ditunjukkan oleh gerakan SIP. Selain itu mengenai adanya refleksi intelektual dari lembaga Yayasan Jurnal Perempuan yang memperlihatkan bagaimana wacana feminisme dan strategi keibuan berinteraksi secara dinamis dalam sejarah sosial-politik di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan sekaligus pembanding dalam penelitian ini antara lain buku *Negara & Perempuan, Representasi Politik*

*Perempuan Masa Orde Baru* karya Siti Fathimah yang terbit pada tahun 2021, yang membahas secara menyeluruh representasi dan peran perempuan dalam politik Indonesia pada masa Orde Baru, khususnya keterlibatan perempuan dalam organisasi-organisasi perempuan bentukan negara serta pengaruhnya terhadap proses pengaplikasian kebijakan publik. Selain itu, penelitian lain yang relevan adalah buku *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru* karya Julia Suryakusuma, yang merupakan hasil penelitian terhadap kegiatan PKK di Desa Buniwangi, Sukabumi, dengan menggunakan konsep ibuisme untuk menunjukkan bagaimana aktivitas PKK dijadikan sebagai salah satu alat hegemoni negara dalam membentuk konstruksi sosial keperempuanan di Indonesia pada masa Orde Baru.

Dari penelitian terdahulu yang telah penulis temukan, penelitian tersebut dapat penulis jadikan sebagai sumber sekunder yang menunjang penulis dalam penelitian ini. Ada pula perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yakni perbedaan dalam metode. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Dalam pembahasan penelitian ini, fokus penulis ialah pada gerakan yang dilakukan oleh Yayasan Jurnal Perempuan dalam melawan representasi perempuan terhadap wacana ibuisme yang dilanggengkan oleh Orde Baru. Ini menjadi kekhasan penelitian penulis dibandingkan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini menjadi penting karena mengkaji periode krusial dalam sejarah Indonesia, yakni akhir masa Orde Baru, dengan menelaah wacana ibuisme negara sebagai salah satu instrumen kontrol pemerintah terhadap perempuan serta upaya Yayasan Jurnal Perempuan dalam merespons dan memanfaatkan celah ideologis yang muncul dari wacana tersebut. Melalui kajian ini, penelitian berupaya memahami dinamika sosial-politik yang membentuk relasi antara negara, perempuan, dan gerakan perempuan pada masa tersebut. Perlu ditegaskan bahwa penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mempertajam pertentangan antara laki-laki dan perempuan, melainkan untuk menganalisis bagaimana negara merepresentasikan dan mengonstruksikan perempuan melalui pelanggaran

wacana tertentu pada masa Orde Baru serta dampak dari hal ini, sekaligus menelaah bentuk-bentuk resistensi perempuan terhadap konstruksi tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam literatur studi gender dengan mengeksplorasi bagaimana perjuangan perempuan di akhir periode masa Orde Baru melalui YJP dalam menentang konstruksi sosial yang membatasi peran mereka, dan dampak dari gerakan ini terhadap kondisi sosial politik Indonesia di tahun 1998. Selain itu, wacana ibuisme yang dibahas dalam penelitian ini tidak hanya relevan pada masa Orde Baru, tetapi juga masih berpengaruh dalam berbagai bentuk masyarakat saat ini. Sehingga penelitian ini dapat membantu memahami bagaimana narasi ini terus berlanjut dan dapat belajar dari strategi gerakan perempuan yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan memahami resistensi YJP pada wacana ibuisme juga dapat menumbuhkan kesadaran kritis akan norma-norma gender dalam kebijakan publik.

## **B. PEMBATASAN MASALAH**

Batasan masalah merupakan hal yang penting bagi penulisan sejarah. Hal ini bertujuan untuk memfokuskan pembahasan penelitian sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak berkaitan dengan topik. Batasan masalah dalam penelitian ini dilihat dari dua hal yakni, secara temporal dan spasial. Batasan temporal pada penelitian ini yaitu dalam kurun waktu 1995-1998 dimana mencakup berdirinya Yayasan Jurnal Perempuan, sampai pada tahun berakhirnya masa Orde Baru. Kemudian pembatasan spasial terfokus pada wilayah Indonesia terutama Jakarta sebagai pusat gerakan Suara Ibu Peduli.

## **C. PERUMUSAN MASALAH**

Dengan menetapkan batasan masalah yang sudah dijabarkan, peneliti merumuskan permasalahan sehingga dapat memberikan arah yang jelas dan fokus terhadap penelitian ini. Pokok permasalahan ini adalah;

1. Bagaimana kondisi sosial-politik perempuan serta konstruksi wacana ibuisme pada masa Orde Baru?

2. Bagaimana kontribusi Yayasan Jurnal Perempuan dalam melawan wacana Ibuisme di akhir masa pemerintahan Orde Baru?

#### **D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Memahami kondisi sosial-politik perempuan serta konstruksi wacana ibuisme pada masa Orde Baru.
2. Memahami kontribusi Yayasan Jurnal Perempuan dalam melawan wacana Ibuisme di akhir masa pemerintahan Orde Baru.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Secara teoritis, penelitian ini berfungsi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan terutama literatur akademik mengenai sejarah perjuangan perempuan pada masa Orde Baru.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan ajar bagi pendidikan sejarah.

#### **E. KERANGKA ANALISIS**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan fokus pada dua teori yang dibutuhkan dalam menganalisis topik yang dibahas. Teori utama yang akan penulis gunakan adalah teori Ibuisme Negara oleh Julia Suryakusuma. Dimana teori ini menjelaskan bagaimana Orde Baru membentuk figur “ibu ideal” yang tunduk, mendukung suami, dan mengabdikan pada negara melalui peran domestik. Dalam konteks ini, perempuan tidak dilihat sebagai subjek politik yang otonom, tetapi sebagai bagian dari proyek pembangunan nasional. Teori ini menjadi dasar untuk menganalisis upaya pemerintah dalam membentuk konstruksi keibuan melalui berbagai kebijakan selama masa orde baru.

Julia Suryakusuma menuliskan teori ini dalam penelitiannya yang menganalisis PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga). Teori ini mengambil konsep *housewifization* (pengiburumahtangaan) dari Maria Mies (1986), konsep



ibuisme dari Madelon Djajadiningrat (1987), dan pendekatan *keywords* (kata kunci) atas teori negara yang dikembangkan oleh Michael van Langenberg (1986). Konsep-konsep ini secara garis besar berkaitan dengan sisi ekonomi, politik, dan budaya yang mempengaruhi konstruksi perempuan dan perannya di masyarakat. Berbagai faktor ini sangat berkaitan satu sama lain, sehingga memperkuat apa yang disimpulkan kemudian oleh Julia Suryakusuma yakni wacana ibuisme terhadap peran perempuan. Ideologi ini menempatkan perempuan terutama sebagai ibu rumah tangga yang patuh, mengabdikan kepada suami, mendidik anak, serta menjaga keharmonisan keluarga. Melalui ideologi ini, negara menata peran gender dengan menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai pendukungnya. Julia menegaskan bahwa ibuisme negara bekerja melalui aparatus ideologi dan aparatus organisasi sehingga negara memobilisasi perempuan sebagai bagian dari proyek pembangunan. Perempuan tidak hanya dilihat sebagai warga negara yang mempunyai hak politik penuh, melainkan sebagai perpanjangan tangan negara untuk mengatur keluarga dan masyarakat.

Konstruksi ini membuat perempuan tampak diberi ruang dalam pembangunan, tetapi sebenarnya membatasi mereka dalam posisi subordinat. Dengan demikian, teori Julia membantu menjelaskan bagaimana negara menggunakan ideologi keibuan untuk mengontrol perempuan, serta bagaimana resistensi muncul ketika perempuan menolak konstruksi tersebut.

Teori kedua yang digunakan penulis dalam menganalisis penelitian ini adalah teori resistensi dari James Caverly Scott. Dalam bukunya yang berjudul *Domination and the Arts of Resistance*, Scott menjelaskan bahwa dalam hubungan kekuasaan antara pihak yang berkuasa dan pihak yang lebih lemah, selalu ada bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kelompok subordinat. Menurut Scott, perlawanan tidak harus selalu muncul dalam bentuk aksi besar atau pemberontakan. Sebaliknya, resistensi sering muncul dalam bentuk-bentuk kecil, diam-diam, dan sehari-hari. Untuk menjelaskan hubungan kekuasaan ini, Scott memperkenalkan dua konsep utama, yaitu *public transcript* dan *hidden transcript*.

Pertama, *public transcript* adalah perilaku atau tindakan yang terlihat di depan umum, ketika kelompok subordinat harus menunjukkan sikap yang dianggap “patut”, seperti patuh, sopan, atau tidak menentang aturan. Sikap ini seringkali hanya “pertunjukan” karena ditampilkan demi menghindari hukuman atau tekanan dari pihak yang berkuasa.

Kedua, *hidden transcript* adalah bentuk ekspresi atau kritik yang muncul di ruang aman ketika pihak yang tertindas berkumpul tanpa pengawasan. Di ruang inilah mereka bisa menyuarakan ketidaksetujuan, keluhan, humor satir, atau bentuk-bentuk resistensi lainnya. *Hidden transcript* tidak hanya berupa ucapan, tetapi juga dapat berupa tindakan kecil seperti memperlambat pekerjaan, mengabaikan aturan tertentu, atau melakukan penyimpangan kecil sebagai bentuk perlawanan.

Scott juga menggunakan istilah *infrapolitics* untuk menggambarkan bentuk perlawanan yang berlangsung secara terselubung dan tidak tampak sebagai aksi politik secara langsung. Ini termasuk praktik-praktik rutin yang dilakukan untuk menolak atau melemahkan kontrol pihak yang berkuasa, meskipun tidak sampai menjadi protes terbuka. Pada situasi tertentu, *hidden transcript* dapat muncul menjadi aksi publik yang lebih jelas, misalnya demonstrasi, protes, atau gerakan sosial. Ketika hal ini terjadi, resistensi yang sebelumnya tersembunyi menjadi bentuk penantangan yang lebih langsung terhadap kekuasaan.

Secara keseluruhan, teori Scott membantu menjelaskan bahwa kelompok subordinat tidak pernah sepenuhnya diam atau pasrah. Mereka memiliki cara-cara tertentu untuk mengekspresikan ketidaksetujuannya, baik secara terselubung maupun terbuka. Teori ini relevan digunakan untuk melihat bagaimana perempuan pada masa Orde Baru melakukan resistensi terhadap wacana negara, bahkan ketika ruang gerak mereka dibatasi. Dalam konteks penelitian ini, teori Scott membantu menjelaskan bagaimana perempuan pada masa Orde Baru melakukan resistensi terhadap wacana ibuisme negara. Melalui tulisan, diskusi, organisasi, dan aksi-aksi publik seperti gerakan SIP, *hidden transcript* perempuan bergerak dari ruang privat



menuju ruang publik sebagai bentuk penantangan terhadap konstruksi gender yang dibentuk negara.

## F. METODE DAN BAHAN SUMBER

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini ialah metode historis atau penelitian sejarah. Metode ini terdiri dari lima tahapan penelitian yakni, Pemilihan Topik, Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, dan Historiografi (Kuntowijoyo, 2018). Dalam menggunakan metode penelitian sejarah ini, dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### a. Pemilihan Topik

Penulis memilih topik sejarah berjudul “*Resistensi Yayasan Jurnal Perempuan terhadap Wacana Ibuisme Masa Orde Baru (1995–1998)*” karena ketertarikan tematik penulis terhadap kajian sejarah perempuan dan isu gender pada masa Orde Baru. Penulis tertarik untuk melihat adanya kontradiksi dalam kebijakan pemerintah yang di satu sisi mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan, namun di sisi lain tetap menempatkan perempuan dalam kerangka ibuisme yang menekankan peran domestik. Konsep peran ganda perempuan, yaitu sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai bagian dari pembangunan, menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Yayasan Jurnal Perempuan dipilih sebagai objek penelitian karena menjadi ruang bagi lahirnya gagasan dan tulisan kritis yang menentang wacana tersebut melalui pendekatan intelektual dan akademik. Topik ini dianggap penting untuk memahami bentuk resistensi perempuan melalui wacana pada akhir masa Orde Baru.

#### b. Heuristik

Pada tahap ini, penulis melakukan penelusuran serta pengumpulan sumber untuk menunjang penelitian sejarah. Terdapat dua jenis sumber yang wajib dikumpulkan penulis dalam melakukan penelitian yakni

sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari pelaku, saksi, atau benda sejarah. Kemudian, sumber sekunder berasal dari pihak yang bukan pelaku sejarah, tetapi pihak lain di luar para pelaku sejarah (pendakwa sejarah misalnya). Benda-benda yang termasuk sumber sekunder antara lain laporan penelitian, ensiklopedia, catatan lapangan peneliti, buku.

Dalam penelusuran sumber, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan dalam mengumpulkan sumber-sumber primer maupun sekunder. Dari hasil penelusuran, penulis mendapatkan sumber primer dan sumber sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Sumber primer yang ditemukan untuk menunjang penelitian ini adalah buku *Catatan Perjalanan Suara Ibu Peduli* terbitan tahun 1999 yang ditulis oleh Nur Iman Subono sebagai salah satu tokoh sejarah yakni aktivis perempuan dalam Gerakan Suara Ibu Peduli. Selain itu penulis juga menemukan koran sezaman yakni koran *Kompas* terbitan tanggal 21 Februari 1998 yang berisikan pemberitaan gerakan Susu Murah. Kemudian sumber sekunder yang dikumpulkan oleh penulis berupa buku fisik dan elektronik yang berkaitan dengan representasi perempuan pada masa Orde Baru dan Gerakan Suara Ibu Peduli, serta jurnal hasil penelitian yang relevan.

#### c. Verifikasi

Tahap ini adalah bagaimana penulis meneliti keabsahan sumber yang telah didapat untuk dijadikan referensi dalam penelitian. Verifikasi sumber dilakukan dengan dua cara, yakni verifikasi eksternal dan internal. Verifikasi eksternal berkaitan dengan keaslian sumber dari bahan yang digunakan. Verifikasi eksternal dilakukan dengan meneliti keaslian sumber secara fisik, terutama pada sumber berupa koran sezaman. Penulis mengidentifikasi kondisi kertas koran yang menunjukkan usia lama, seperti warna kertas yang telah menguning serta adanya titik-titik jamur di beberapa bagian tepi kertas.

Selain itu, penulis memperoleh sumber primer berupa koran sezaman dengan menelusuri arsip koran yang disimpan oleh Perpustakaan Nasional, sehingga dapat dipastikan bahwa koran yang digunakan berasal dari periode waktu yang sesuai dengan penelitian.

Sementara itu, verifikasi internal dilakukan dengan menelaah dan membandingkan isi sumber satu dengan sumber lainnya. Dalam penggunaan sumber wawancara, penulis terlebih dahulu melakukan pengecekan latar belakang narasumber untuk memastikan keterkaitan dan kredibilitasnya dengan topik penelitian. Hasil wawancara kemudian dibandingkan dengan berbagai tulisan, artikel, maupun karya yang ditulis oleh tokoh yang bersangkutan, serta dengan sumber tertulis lain yang relevan. Langkah ini dilakukan untuk melihat konsistensi informasi dan membantu penulis menentukan fakta-fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Interpretasi

Pada tahap interpretasi, penulis tidak hanya memaknai fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh, tetapi juga mengaitkannya dengan kerangka teori yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu konsep ibuisme negara dan teori resistensi James C. Scott. Dalam proses analisis, fakta-fakta dari sumber sejarah dianalisis untuk melihat bagaimana wacana ibuisme negara dibentuk dan dijalankan oleh pemerintah Orde Baru, khususnya dalam mendefinisikan peran perempuan melalui kebijakan, organisasi, dan narasi resmi negara. Fakta-fakta tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi posisi perempuan dalam kerangka ideologi negara yang menekankan peran domestik sekaligus peran pendukung pembangunan.

Selanjutnya, teori resistensi James Scott digunakan dalam tahap analisis untuk memahami bentuk-bentuk perlawanan yang muncul terhadap wacana tersebut. Penulis menganalisis strategi aktivitas yang dilakukan Jurnal perempuan sebagai bentuk resistensi yang tidak

dilakukan secara terbuka, tetapi melalui kritik intelektual dan penyebaran pengetahuan alternatif. Pada tahap sintesis, hasil analisis dari kedua teori tersebut kemudian disatukan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara wacana ibuisme negara dan upaya resistensi yang dilakukan Yayasan Jurnal Perempuan. Dengan demikian, interpretasi ini membantu penulis merekonstruksi sejarah resistensi perempuan terhadap hegemoni negara pada akhir masa Orde Baru secara lebih komprehensif.

e. Historiografi

Tahapan terakhir dalam metode penelitian sejarah adalah historiografi yakni penulisan sejarah. Penulis menyajikan hasil rekonstruksi sejarah dari penelitiannya. Rekonstruksi ini berbentuk tulisan yang sistematis, logis, dan jelas sesuai prinsip penelitian ilmiah. Hasil penelitian ini dapat berupa karya ilmiah, seperti skripsi yang terstruktur dalam empat bab utama yang mencakup pendahuluan, isi, dan kesimpulan.

## 2. Bahan Sumber

Penulis menggunakan sumber primer dan sumber sekunder dalam menunjang penelitian ini. Sumber primer dan sumber sekunder yang didapatkan oleh penulis melalui proses penelusuran sumber di Perpustakaan Nasional, toko-toko buku, dan jurnal elektronik. Beberapa sumber primer yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah buku *Catatan Perjalanan Suara Ibu Peduli*, yang diterbitkan pada 1999 dan tulisan *Politik Representasi Suara Ibu Peduli* oleh aktivis perempuan sekaligus tokoh sejarah dalam peristiwa terkait. Peneliti juga menemukan koran *Kompas*, *Suara Pembaharuan*, serta beberapa koran lain yang diterbitkan sezaman. Sumber sekunder yang menunjang penelitian ini, penulis dapatkan dengan penelusuran buku-buku sejarah dengan topik yang relevan seperti 'Negara dan Perempuan: Representasi Politik Perempuan Masa Orde Baru' karya Siti Fathimah, 'Perempuan dalam Wacana Politik

Orde Baru', buku ini merupakan Kumpulan dari artikel Prisma dengan dieditori oleh Liza Hadiz, jurnal, dan penulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

